

## BAB III

## USAHA PENUMPASAN PEMBERONTAKAN PKI

## A. Politik Pemerintah RI

Sejak proklamasi 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia dihadapkan kepada perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamirkan itu. Dengan berbagai cara, Belanda berusaha untuk kembali menjajahnya. Misalnya dengan membongkang "Sekutu yang akan melucuti Jepang", atau dengan kekuatannya secara terang-terangan mengadakan agresi terhadap kedaulatan Republik Indonesia. Maka Pemerintah Republik Indonesia dalam perjuangannya berpedoman kepada politik diplomasi yaitu dengan jalan berunding dengan Belanda. Disamping itu ditunjang dengan kekuatan perang (gerilya) sehingga memberi bobot kepada keberhasilan perundingan atau diplomasi.

Oleh Sartono Kartodirdjo dikatakan bahwa hal itu senantiasa memperhitungkan faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah adanya interaksi antara golongan-golongan, sedang faktor eksternal adalah adanya konstelasi internasional yang tersusun oleh hubungan antara bangsa-bangsa.<sup>1</sup>

Politik diplomasi dilakukan karena pengalaman dari memegang kekuasaan Republik Indonesia yang dibesarkan dan digembleng dalam suatu perjuangan politik yang berat dan dalam waktu yang lama melawan penjajah Belanda. Dengan demikian menimbulkan sikap hati-hati dan menggariskan suatu strategi yang bersifat penampilan lunak (low profil) untuk mengambil hati sekutu yang memenangkan Perang Dunia II, dengan menghindarkan image yang agresif dan militan.

Hal yang demikian berlawanan dengan sikap generasi muda. Mere-

---

<sup>1</sup>Sartono Kartodirdjo, "Wajah Revolusi Indonesia", Prisma 8 (Agustus, 1981), hal.4

ka menghendaki supaya Republik Indonesia memiliki satu kekuatan bersenjata untuk mempertahankan Republik Indonesia dari ancaman kekuatan asing.<sup>2</sup>

Untuk mempertahankan Republik Indonesia, mereka menghendaki dengan jalan perjuangan atau perang sehingga Belanda terusir sama sekali dari Indonesia.

Sinkronisasi dari politik diplomasi dan perjuangan bersenjata, menghasilkan pengakuan terhadap Republik Indonesia secara defakto dan ketika Belanda mengadakan agresi kepada RI mendapatkan perlawanan dari kekuatan bersenjata (gerilya) Republik Indonesia.

Agresi Belanda yang pertama pada tanggal 20 Juli 1947 sebagai pelanggaran perjanjian Linggarjati, mendapatkan reaksi keras dari dunia dan membuka mata dunia terhadap persoalan RI-Belanda. Untuk pertama kali masalah itu dibicarakan dalam Dewan Keamanan PBB yang kemudian melahirkan Komisi Tiga Negara (KTN).<sup>3</sup> Dengan KTN, Belanda dan RI mengadakan persetujuan yang disebut perjanjian Renville. Akan tetapi untuk yang kedua kalinya Belanda melanggar perjanjian itu dengan mengadakan agresi terhadap kedaulatan RI. Dengan perlawanan kekuatan bersenjata (gerilya) Belanda akhirnya "mengakui" kedaulatan Republik Indonesia dengan diadakannya Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag antara Pemerintah Republik Indonesia dan Belanda pada tahun 1949.

Karena politik diplomasi yang demikian, ditunjuk St. Syahrir dan Mr. Amir Syarifuddin sebagai formatur Kabinet dan Perdana Menteri. St. Syahrir dikenal sebagai pengagum "Barat" dan bersih dari kerja sama dengan fasisme Jepang. Sedang Mr.

---

<sup>2</sup> Nugroho Notosusanto, "Sudirman : Panglima Yang Menepati Janjinya", Prisma 8 (Agustus, 1977), hal. 18

<sup>3</sup> Nyoman Dekker, Sejarah Revolusi Nasional, (Jakarta : P. N. Balai Pustaka, 1980), hal. 56-57

Amir Syarifuddin adalah tokoh penentang fasisme Jepang yang hampir saja mendapat hukuman mati kalau tidak karena jasa Bung Karno.

Perpecahan St.Syahrir dengan Mr.Amir Syarifuddin dalam tubuh Partai Sosialis dan keadaan sistim partai pada waktu itu, menyebabkan disstabilisasi pemerintahan.

"...Pada zaman Perang Kemerdekaan lahir banyak badan perjuangan. Badan-badan perjuangan ketika itu tidak memusatkan diri kepada politik dalam arti membawa dan memperjuangkan ideologi yang dianut oleh partai. Partai-partai politik itu pada umumnya juga memusatkan kegiatannya kepada perjuangan melawan Belanda yang ketika itu berusaha menyerbu dan meniadakan Republik. Semenjak tahun 1947 badan-badan perjuangan yang lahir pada masa Perang Kemerdekaan itu sebagian anggotanya masuk kedalam TNI dan sebagian lain memasuki atau mendirikan partai politik. Dengan demikian bertambahlah jumlah partai-partai politik yang bertarung dan berusaha untuk duduk dalam pemerintahan. Akibat dari saling perebutan yang demikian, timbullah instabilitas politik".<sup>4</sup>

Kabinet sering jatuh bangun, sehingga tidak mampu melaksanakan program kerjanya secara kontinyu. Persatuan Nasional terancam, yang pada puncaknya keadaan politik yang demikian merupakan salah satu kesempatan yang digunakan oleh PKI untuk mengadakan pemberontakan.

Dalam menghadapi gejolak pertentangan berbagai kelompok, golongan, aliran dan ideologi, politik pemerintah tetap mempertimbangkan dua hal :

1. Mencapai orde kesejahteraan umum dalam masyarakat;
2. Memupuk tumbuhnya demokrasi kita.<sup>5</sup>

Menurut pertanggung jawaban Perdana Menteri Moh.Hatta yang sekaligus merangkap sebagai "akil Presiden dalam BP-KNIP tanggal 2 September 1948 menyatakan sebagai berikut :

---

<sup>4</sup>Sartono Kartodirdjo dkk., Sejarah Nasional Indonesia, Jilid VI (Jakarta:Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975), hal.250

<sup>5</sup>Nasution A.H., Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Jilid 8 (Bandung : Angkasa, 1978), hal.102

"Kita disini mengemukakan pendidikan rakyat kejalan demokrasi, dan karena itu berhati-hati dalam mengambil tindakan supaya demokrasi jangan mati pada rumpunnya.

Demokrasi yang baru tumbuh sering melewati batas, menimbulkan ekses. Selama ekses itu merupakan "kinderkrankheit des radikalismus" Pemerintah akan sabar, dan sikapnya itu sering merupakan kelemahan.

Akan tetapi apabila "kinderkrankheit" itu sudah sangat melewati batas, dengan mengadakan intimidasi dan menimbulkan anarki, sehingga keselamatan negara jadi terancam, maka pemerintah akan mengadakan koreksi. Dan kalau perlu, suatu koreksi dengan tangan besi.

Pemerintah sekarang tidak ragu-ragu dalam menghadapi berbagai hal dan kejadian, sekalipun ia bersikap tenang.

Kami mempunyai garis pemerintahan yang tertentu. Pada dasarnya pemerintah ingin melihat berkembangnya demokrasi selekas-lekasnya yang tumbuh dengan segar atas asuhan masyarakat sendiri. Tetapi sebaliknya ia juga bersedia untuk mencegah tindakan-tindakan yang memperkosa demokrasi atau yang menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Dalam hal ini pemerintah sudah menyatakan sikapnya. Keterangan kami berhubung dengan pemogokan di "elanggu cukup jelas bagi umum".<sup>6</sup>

Dalam Pertanggung jawaban tersebut dinyatakan pula bahwa Kabinet Presidensiil yang dipimpin oleh Hatta bersifat sementara yaitu untuk meredakan suasana politik, agar dalam waktu berikutnya dapat dibentuk suatu Kabinet Parlemerter yang kuat.

"...Seperti diketahui, maksud saya semula waktu membentuk Kabinet Presiden ini ialah bahwa Kabinet ini bersifat sementara dan hendaknya diganti selekas-lekasnya dengan Kabinet Parlemerter. Kabinet Presiden gunanya bagi saya untuk meredakan suasana politik, supaya dalam waktu yang singkat dapat dibentuk suatu Kabinet Parlemerter yang kuat. Tetapi perjuangan politik yang semakin hebat menyukarkan pembentukan Kabinet Parlemerter itu".<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Ibid, hal. 102

<sup>7</sup>Loc.Cit.

Pada akhirnya Hatta mampu membawa Indonesia kemeja perundingan dengan Belanda didalam KMB, dengan hasil pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda.

Setelah Perang Dunia II, timbul pertentangan antara Amerika Serikat yang kapitalis disatu pihak dengan Rusia yang komunis dilain pihak. Situasi internasional yang demikian membawa pengaruh terhadap negara-negara yang sedang berjuang melawan penjajah.

Republik Indonesia yang sedang berjuang melawan penjajah Belanda untuk mempertahankan kemerdekaannya tidak terlepas dari pengaruh kedua kekuatan tersebut. Rusia yang mengkleim dirinya sebagai kekuatan anti imperialis dengan "Two Camp Doctrine"-nya mencoba membawa Indonesia berada dibawah pengaruhnya. Kedatangan Suripno dan Muso di Indonesia pada tahun 1948 yang membawa strategi baru Moskow, mencoba membawa Indonesia yang sedang berjuang melawan imperialis Belanda berpihak pada Rusia. Maka timbul pertentangan antara pemerintah dengan PKI, yang terakhir ini mengatakan :

"...bahwa pertentangan yang ada didunia ini adalah antara blok Amerika Serikat dengan blok Uni Sovyet, jadi revolusi Indonesia adalah bagian dari pada revolusi dunia, maka Indonesia haruslah berada dipihak Rusia, barulah benar".<sup>8</sup>

Jawaban Pemerintah Republik Indonesia terhadap kecaman yang dilontarkan PKI, dan sebagai sikap pemerintah RI, maka pada tanggal 2 September 1948 Wakil Presiden/Perdana Menteri Moh.Hatta menjelaskan dalam pertanggung jawabannya kepada Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) yang antara lain sebagai berikut :

"...Tetapi mestikah kita bangsa Indonesia, yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita, hanya ha-

---

<sup>8</sup>Sartono Kartodirdjo dkk., Op.Cit. hal.325

rus memilih antara pro Rusia atau pro Amerika? Apakah tak ada pendirian yang lain yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita ?

Pemerintah berpendapat, bahwa pendirian yang harus kita ambil ialah supaya kita jangan menjadi obyek dalam pertarungan politik internasional, melainkan kita harus tetap menjadi subyek yang berhak menentukan sikap kita sendiri, berhak memperjuangkan tujuan kita sendiri, yaitu Indonesia merdeka seluruhnya. Perjuangan kita harus diperjuangkan diatas dasar semboyan kita yang lama : percaya akan diri sendiri dan berjuang atas kesanggupan kita sendiri.

Ini tidak berarti bahwa kita tidak akan mengambil keuntungan dari pada pergolakan politik internasional. Memang tiap-tiap politik untuk mencapai kedudukan negara yang kuat ialah mempergunakan pertentangan internasional yang ada itu untuk mencapai tujuan nasional sendiri. Belanda berbuat begitu, ya, segala bangsa sebenarnya berbuat semacam itu, apa sebab kita tidak akan melakukannya ? Tiap-tiap orang diantara kita tentu ada mempunyai simpati terhadap golongan ini atau golongan itu akan tetapi perjuangan bangsa tidak bisa dipecah menurut simpati saja, tetapi hendaknya didasarkan kepada realitet, kepada kepentingan negara kita setiap waktu.

Sovyet Rusia sendiri memberi contoh kepada kita, bahwa politik internasional tidak bisa dihadapi dengan sentimen, tetapi dengan realitet dan dengan logika yang rasionil. Dalam tahun 1936, tatkala Sovyet Rusia menghadapi arus fasis ia mengubah haluannya yang radikal yaitu menentang negara-negara demokrasi Barat dan menganjurkan kepada kaum komunis diluar Rusia untuk memberhentikan serangannya kepada pemerintah-pemerintah kapitalis dan beserta dengan mereka mengadakan suatu volksfront politik menentang fasis. Malahan kepada bangsa-bangsa yang terjajah diwaktu itu dianjurkan supaya memberhentikan perjuangannya yang tajam menentang imperialisme kolonial, melepaskan sementara waktu cita-cita kemerdekaan, dan memperkuat volksfront yang dianjurkan tadi. Dalam tahun 1939 Sovyet Rusia mengadakan perjanjian non-agresi dengan Nazi Jerman, dan dengan perjanjian itu Rusia selama 18 bulan terpelihara dari pada serangan dari Hitler; sementara itu ia dapat memperkuat alat pertahanannya. Timbangan yang rasionil memaksa Sovyet Rusia mengadakan perjanjian dengan musuhnya. Dan apabila politik hanya didasarkan pada sentimen, yang demikian itu, tentu tidak mungkin terjadi.

Tentang perjuangan Indonesia, memang dapat dinyatakan dua aliran politik yang berlainan, yang pada dasarnya sangat kuatnya jika dipandang dari pokok pemahannya masing-masing. Jika perjuangan ini ditinjau dari jurusan komunisme, memang benar pendirian bahwa segala-galanya didasarkan kepada politik Sovyet Rusia. Bagi seorang komunis, Sovyet Rusia adalah modal untuk mencapai segala cita-citanya, karena dengan Sovyet Rusia bangun atau jatuh perjuangan komunisme. Sovyet Rusia adalah pelopor menyelenggarakan idealnya, sebab itu kepentingan Sovyet Rusia dalam perjuangan politik internasional diutamakan. Kalau perlu, untuk memperkuat kedudukan Sovyet Rusia, segala kepentingan diluar Sovyet dikorbankan, terhitung juga kepentingan kemerdekaan negara-negara jajahan, sebagaimana terjadi pada tahun 1935 dan seterusnya. Sebab, menurut pendapat mereka apabila Sovyet Rusia yang dibantu tadi sudah mencapai kemenangannya dalam pertempuran dengan imperialisme, kemerdekaan itu akan datang dengan sendirinya.

Tidak demikian pendirian seorang nasionalis, sekalipun pandangan kemasyarakatannya berdasarkan sosialisme. Dari jurusan politik nasional kemerdekaan itulah yang utama, sehingga segala tujuan dibulatkan kepada perjuangan mencapai kemerdekaan itu. Perhitungan yang terutama ialah, betapa aku akan mencapai kemerdekaan bangsaku dengan secepat-lekasnya. Dan dengan sendirinya perjuangannya itu mengambil dasar lain dari pada perjuangan yang dianjurkan oleh seorang komunis. Kemerdekaan nasional terutama siasat perjuangan disesuaikan dengan keadaan. Oleh karena itu tidak dengan sendirinya ia memilih antara dua aliran yang bertentangan. Betapa juga simpatinya kepada aliran yang lebih dekat padanya, ia tetap memilih langkah sendiri dalam menghadapi soal-soal kemerdekaannya. Betapa juga lemahnya kita sebagai bangsa yang baru merdeka dibandingkan dengan dua raksasa yang bertentangan, Amerika Serikat dan Uni Sovyet, menurut anggapan pemerintah kita harus tetap menempatkan perjuangan kita atas adagium: percaya kepada diri sendiri dan berjuang atas tenaga dan kesanggupan yang ada pada kita".<sup>9</sup>

Politik pemerintah yang demikian itu disebut politik luar negeri yang bebas aktif, yang dalam Sejarah Nasional Indone-

---

<sup>9</sup>Nasution A.H., Op.Cit. hal.85-87

sia dinyatakan sebagai berikut :

"Demikianlah tidak ada alasan bagi Indonesia untuk memilih antara dua blok yang besar itu. Indonesia memilih jalannya sendiri, yang disebut politik bebas aktif, dari pada bermusuhan dengan salah satu blok, yang hanya merugikan kepada kepentingan bangsa Indonesia sendiri. Indonesia lebih suka bersahabat dengan segala bangsa atas dasar harga menghargai, perbedaan sistem sosial dan ideologi jangan hendaknya menjadi penghalang untuk saling menghargai demi kepentingan bersama. Maka dengan demikian, jelaslah dasar politik luar negeri yang pertama diletakkan oleh Pemerintah RI pada tahun 1948, selagi bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaannya dan memperjuangkan kemerdekaan terhadap Kerajaan Nederland".<sup>10</sup>

Dengan pertanggung jawaban Hatta dimuka BP-KNIP tanggal 2 September 1948 lebih ditegaskan bahwa politik Pemerintah RI, keluar ialah berunding dan menyelesaikan persengketaan dengan Belanda dan kedalam menyempurnakan organisasi Kekuasaan RI dan dengan itu diadakan perbaikan penghidupan rakyat. Para anggota BP-KNIP mendukung pertanggung jawaban tersebut kecuali anggota FDR/PKI atau yang dapat dipengaruhi oleh FDR/PKI. Hatta mendapat dukungan mayoritas dari anggota BP-KNIP, terutama dari fraksi PNI dan Masyumi, sehingga FDR/PKI semakin radikal dalam oposisinya. Kemudian FDR/PKI mengadakan pemberontakan kepada Pemerintah Republik Indonesia. Sesuai dengan politiknya, pemerintah dengan dukungan rakyat menumpas pemberontakan komunis tersebut baik secara politik maupun militer.

#### B. Penumpasan secara politik

Berita pemberontakan PKI di Madiun yang meletus pada tanggal 18 September 1948 baru diterima oleh Pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta sore hari. Presiden kemudian mengumpulkan

---

<sup>10</sup> Sartono Kartodirdjo dkk., Loc.Cit.



anggota kabinet. Akan tetapi agaknya mengalami kesulitan karena sore hari itu hari Sabtu. Sedang Panglima Besar Sudirman juga sedang berada diluar kota. Pada waktu itu telah berkumpul di Istana Presiden diantaranya : A.H.Nasution, Menteri Ali Sastroamidjojo dan koordinator keamanan Sultan Hamengkubuwono IX. Inisiatif pertama dilontarkan oleh A.H.Nasution yang telah sejak lama mengikuti gerak gerik PKI. Maka pada waktu terlaksana Sidang Kabinet yang juga dihadiri oleh Panglima Besar Sudirman, dalam tempo hanya beberapa menit sidang telah menyetujui konsep perintah dan pemberian wewenang kepada Panglima Besar Sudirman untuk bertindak menyelamatkan negara dan kemudian Presiden segera menanda tangannya. Keputusan Pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta adalah menumpas dan membasmi pemberontakan PKI di Madiun. Sehubungan dengan itu Pemerintah kemudian melarang dua buah percetakan untuk mencetak beberapa surat kabar yang menyuarakan PKI, yaitu percetakan "Canisius" yang mencetak surat kabar Patriot dan percetakan "Negara" yang mencetak surat kabar-surat kabar Buruh, Revolusioner dan Mingguan Bintang Merah.

Untuk menghadapi situasi yang demikian pemerintah memobilisir rakyat dan sesuai dengan keputusan diatas yaitu menumpas dan membasmi pemberontakan itu.

Pada tanggal 19 September 1948 berturut-turut berpidato Presiden Sukarno, Sultan Hamengkubuwono IX, Menteri Sukiman dan Jenderal Sudirman.

Dalam pidatonya jam 20.00 secara dramatis Presiden mengatakan antara lain :

"...Pada saat ini Tanah Air kita mengalami suatu percobaan besar. Selagi kita menghadapi persengketaan dengan Belanda, yang menghendaki persatuan rakyat yang bula t dibelakang pemerintah, supaya kedudukan kita dalam persengketaan itu jadi kuat, selagi kepentingan negara menghendaki persatuan, rakyat dipecah persatuannya oleh

pengacau-pengacau. Perjuangan politik yang sehat memang dikehendaki untuk menyuburkan tumbuhnya demokrasi kita. Memang dengan tegas pemerintah, dengan ucapan Wakil Presiden dalam Badan Pekerja tanggal 16 bulan ini, mengatakan, bahwa ideologi, betapapun juga caranya, tidak akan ditindas oleh pemerintah. Tetapi segala tindakan anarki dari mana juga datangnya pengacau-pengacau yang membahayakan negara dan mengganggu keselamatan umum akan dibasmi.

Pemerintah hanya menunjukkan tindakan korektif kepada pengacau-pengacau, yang membahayakan negara dan membahayakan keselamatan umum. Tindakan mengacau itu tidak sedikit terjadi pada waktu yang akhir ini. Ternyata sekali bahwa tindakan itu dikemukakan oleh lebih dari satu dalang, yang satu sama lain barangkali tak ada hubungannya, tetapi mereka satu dalam tujuan, yaitu : merobohkan Pemerintah Republik Indonesia.

.....  
 Saudara-saudara camkan benar-benar apa artinya itu : Negara Republik Indonesia yang kita cintai, hendak direbut oleh "PKI-Muso".

Rakyatku yang tercinta. Atas nama perjuangan untuk Indonesia merdeka, aku berseru padamu : "Pada saat yang begini genting dimana engkau dan kita sekalian mengalami percobaan yang sebesar-besarnya dalam menentukan nasib kita sendiri, bagimu adalah pilihan antara dua : "ikut Muso dengan PKI-nya yang akan membawa bangkrutnya cita-cita Indonesia merdeka, atau ikut Sukarno-Hatta, yang insya Allah dengan bantuan Tuhan akan memimpin Negara Republik Indonesia kita ke Indonesia yang merdeka tidak dijajah oleh negeri apapun juga". Saya percaya, bahwa rakyat Indonesia, yang sudah sekian lama berjuang untuk mencapai kemerdekaannya, tidak akan ragu-ragu berdiri dibelakang kami dan pemerintah sekarang yang sah, bertindaklah dengan tidak ragu-ragu pula".<sup>11</sup>

Pada malam itu juga Muso menjawab pidato Presiden Sukarno melalui "Radio Gelora Pemuda", Madiun, yang mengatakan antara lain :

Pada tanggal 18 September 1948 rakyat daerah Madiun telah memegang kekuasaan negara dalam tangannya sendiri. Dengan begitu rakyat Madiun telah melaksanakan kewajiban

---

<sup>11</sup> Moehkardi, Akademi Militer Yogya Dalam Perjuangan Fisik 1945-1949 (Jakarta : PT Inaltu, 1977), hal.93-94

revolusi nasional kita ini, bahwa ia seharusnya dipimpin oleh rakyat sendiri dan bukan oleh kelas lain.

Sudah tiga tahun ini revolusi nasional kita berjalan dibawah pimpinannya kaum borjuis, yang bersifat goyang menghadapi imperialis umumnya dan terhadap Amerika khususnya. Inilah sebab yang terakhir bahwa keadaan ekonomi dan politik dalam republik semuanya menjadi terus menerus buruk.

Dengan begitu rakyat semuanya, kaum buruh dan tani khususnya, sama sekali tak dapat membedakan keadaan sekarang ini dari pada keadaan selama zaman Belanda dan Jepang.

Sebaliknya, anasir-anasir yang memerintah telah memakai revolusi kita sebagai kuda-kudaan untuk menguntungkan diri. Mereka sewaktu pendudukan Jepang telah menjadi quisling-quisling, budak-budak Jepang, tukang jual romusha dan propagandis-propagandis Heiho. Lebih dari 2 milyar wanita Indonesia telah menjadi janda lantaran lakinya menjadi romusha. Sekarang mereka akan menjual Indonesia dan rakyatnya sekali pada imperialis Amerika !

Sukarno dengan memakai alasan-alasan palsu telah menuduh FDR dan PKI sebagai tukang pengacau dan lain-lain.

Lupakah Sukarno bahwa ia di Solo telah memakai kaum pengkhianat Troztkis untuk melakukan penculikan-penculikan dan teror terhadap orang-orang komunis ?!

Lupakah Sukarno dkk. ex-pedagang romusha, dengan melepaskan penjahat-penjahat Troztkis Tan Malaka dkk. yang telah mencoba merobohkan kepresidenannya.

Dalam tiga tahun ini teranglah pula bahwa Sukarno-Hatta ex-romusha verkopers, quislings, telah menjalankan politik kapitulasi terhadap Belanda, Inggris dan sekarang juga akan menjual Indonesia dan rakyat pada imperialis Amerika.

Bolehkah orang-orang semacam itu bilang, bahwa mereka mempunyai hak yang sah untuk memerintah Republik Kita ?

Rakyat Indonesia tidak butuh.

Rakyat belum lupa semboyan-semboyan Sukarno.

Mereka mengerti, bahwa kaum dagang romusha tak becus memerintah negara. Oleh karena itu, rakyat Madiun dan juga didaerah-daerah lain sekarang akan melepaskan diri dari budak-budak imperialis itu. Sukarno selama membudak Jepang telah bilang : "Untuk Inggris: Linggis, untuk Amerika: Seterika ! rakyat belum lupa ini.

Bukan Sukarno, bukan Hatta yang melawan Belanda, Inggris dan Amerika sekarang ini, tetapi rakyat Indonesia sendiri.

Berhubung dengan itu, kejadian di Madiun dan lain-lain tempat, untuk rakyat seluruh Indonesia adalah sinyal untuk

merebut kekuasaan negara dalam tangannya sendiri. Inilah jaminan satu-satunya, bahwa republik kita akan berdaulat benar-benar, dan akan cukup menghadapi serangan-serangan dari luar dan untuk selama-lamanya melepaskan diri dari bujang-bujang imperialisme itu.

Rakyat seharusnya menjawab : "Sukarno-Hatta, budak-budak Jepang dan Amerika ! Memang ciri wanci lali ginowo mati".

Pasti rakyat akan jawab "Musu selamanya menghamba rakyat Indonesia".!

Hidup Merdeka !

Menang Perang !" <sup>12</sup>

Menurut Muhammad bin H.Thoha, bahwa atas laporan seorang Masyumi yang datang dari Madiun, oleh Panglima Besar Sudirman kemudian diperintahkan untuk menyebarkan pamflet yang berbunyi : "pilih Muso atau Sukarno"! Hal tersebut beralasan karena agitasi PKI bahwa presiden itu adalah Muso, sedang lawan-lawan PKI terutama Hizbullah sedang tidak ada dalam asrama, sudah tersebar memimpin umat Islam melawan PKI yang telah menganiaya dan membunuh para Ulama. <sup>13</sup>

Pidato Presiden Sukarno tersebut sangat besar pengaruhnya terutama bagi pihak-pihak yang semula masih ragu-ragu, kemudian jadi dapat tegas untuk menentukan pilihannya dimana mereka harus berdiri.

Onghokham menulis antara lain :

"Akhirnya orang Madiun sendiri rupanya agak heran mendengar dari radio Yogya bahwa mereka adalah pemberontak sebab bagi mereka coup di Madiun tidak lain dari pada aksi pendaulatan yang selama ini sering terjadi. Kesalahan psikologis dan politis terbesar dibuat oleh Muso ketika didepan radio Madiun dia berpidato menjawab pidato Sukarno pada tingkat yang sama, yaitu secara nasional. Retorik Muso adalah : pilih Muso ! Dan itu diucapkan dalam perkembangan revolusi dimana kepemimpinan nasional Sukarno-Hatta justru semakin kokoh tertanam, se-

<sup>12</sup> Nasution A.H., Op.Cit. hal.246-247

<sup>13</sup> Wawancara dengan Muhammad bin H.Thoha, 10 Juli 1981, di Madiun

dangkan Muso hanyalah seorang baru bagi Indonesia".<sup>14</sup>

Dipertegas lagi dengan pidato Menteri Agama, Kyai Haji Masykur, di Yogyakarta yang menyatakan bahwa perebutan kekuasaan oleh PKI di Madiun adalah bertentangan dengan Agama dan disamakan dengan perbuatan musuh.<sup>15</sup>

Untuk mengimbangi PKI dengan pemerintahan rakyat/merah "Front Nasional"-nya, pada tanggal 19 September 1948 di Yogyakarta dibentuk "Front Kemerdekaan Nasional" yang bertujuan untuk mengamankan Republik Indonesia dan mempertahankan Pemerintah Sukarno yang sah. Adapun pengurus besarnya terdiri atas :

"Ketua	: Mangunsarkoro (PNI)
Wakil Ketua	: Mr.Samsuddin (Masyumi)
Sekretaris merangkap Kepala Bagian Penerangan	: Muhammad Saleh Suhaidi". <sup>16</sup>

Walaupun telah diberlakukan Keadaan Bahaya dengan diangkatnya Gatot Subroto sebagai Gubernur Militer di Solo sejak tanggal 16 September 1948, Hatta dalam sidangnya dengan BP-KNIP tanggal 20 September 1948, mengusulkan "Undang-undang Pemberian Kekuasaan Penuh Kepada Presiden Dalam Keadaan Bahaya", selama 3 bulan terhitung mulai tanggal 15 September 1948. Dengan Undang-undang itu Pemerintah mempunyai dasar untuk melakukan tindakan yang semestinya guna menjamin keselamatan negara dalam menghadapi bahaya yang memuncak sehubungan dengan pemberontakan PKI di Madiun. BP-KNIP dengan spontan menerima usul yang diajukan itu, yang berarti memberi kekuasaan penuh kepada Presiden untuk menyelamatkan negara. Undang-undang tersebut berbunyi sebagai berikut :

---

<sup>14</sup> Onghokham, "Pemberontakan PKI Madiun 1948", Prisma 7 (Agustus, 1978), hal.69

<sup>15</sup> Nasution A.H., Op.Cit. hal.258

<sup>16</sup> Ibid, hal.252

"Undang-undang Tentang Pemberian Kekuasaan Penuh Kepada Presiden Dalam Keadaan Bahaya.

Menimbang :

Bahwa untuk menjamin keselamatan negara dalam menghadapi keadaan bahaya yang memuncak pada dewasa ini, perlu diberikan kekuasaan penuh (plein pouvoir) kepada presiden;

Mengingat :

Pasal 12 Undang-undang Dasar dan Undang-undang Keadaan Bahaya tertanggal 6 Juni 1946 No.6;

Mengingat pula :

Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Dasar pasal IV aturan Peralihan Undang-undang Dasar, serta Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 no.X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat.

Memutuskan :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

Undang-undang tentang Pemberian Kekuasaan Penuh Kepada Presiden Dalam Keadaan Bahaya.

Satu-satunya pasal.

Selama tiga bulan, terhitung mulai tanggal 15 September 1948 kepada Presiden diberikan kekuasaan penuh (plein pouvoir) untuk menjalankan tindakan-tindakan dan peraturan-peraturan, dengan menyimpang dari Undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada, guna menjamin keselamatan negara dalam menghadapi keadaan bahaya yang memuncak.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 20 September 1948

Presiden Republik Indonesia,  
Sukarno

Menteri Dalam Negeri a.i.  
Sukiman

Menteri Pertahanan a.i.  
Moh.Hatta

Menteri Kehakiman  
Susanto Tirtoprodjo

Diumumkan

Pada tanggal 20 September 1948

Sekretaris Negara  
A.G.Pringgodigdo".17

---

<sup>17</sup>Nasution A.H., Op.Cit. hal.251-252

Setelah pemberontak PKI mengetahui sikap pemerintah RI di Yogyakarta yang akan menumpasnya, Amir Syarifuddin menawarkan perundingan, akan tetapi dijawab oleh Pemerintah Republik Indonesia bahwa tidak akan ada perundingan dengan para pemberontak. Setelah sikap Pemerintah RI mendapat dukungan rakyat, Amir Syarifuddin berusaha mengelabui dan membohongi rakyat dengan pidatonya antara lain sebagai berikut :

"...tidak khawatir atas tindakan Pemerintah Republik memakai kekerasan untuk membasmi perjuangan rakyat. Undang-undang Dasar Republik tetap menjadi Undang-undang Dasar kita, Bendera Merah Putih tetap bendera kita dan Indonesia Raya tetap lagu kebangsaan kita... Pemerintah Republik makin lama makin jauh dari rakyat..."<sup>18</sup>

Tentang dukungan rakyat kepada Muso dinyatakan oleh Abu Hanifah sebagai berikut :

"Lama kelamaan nyata bagi Muso, bahwa rakyat banyak tidak berpihak kepada mereka, dan kekuatan mereka hanya ada di daerah-daerah Jawa Tengah saja. Maka berubahlah pidato-pidato mereka, yang mula-mula mengumandangkan suatu "Republik Proletar Indonesia". Pidato penghabisan yang diucapkan oleh Amir Syarifuddin tanggal 23-September berbunyi sebagai berikut : "Perjuangan yang kami adakan waktu ini hanya buat memberi koreksi kepada revolusi-revolusi kita. Jadi dasarnya tidak berubah sama sekali. Revolusi ini tidak berubah dari corak nasionalismenya, yang sebenarnya adalah revolusi merah putih, dan lagu kebangsaan kami tetap Indonesia Raya".<sup>19</sup>

Polit Biro PKI juga melontarkan tuduhan kepada Sukarno-Hatta sebagai pengkhianat bangsa, agen kaum kapitalis dan penjual romusha, untuk menarik dukungan rakyat. Dalam hubungan ini, Belanda mencoba ikut campur masalah intern Indonesia dengan jalan menawarkan bantuan untuk menumpas pemberontakan PKI.

---

<sup>18</sup>Ibid, hal.258

<sup>19</sup>Abu Hanifah, "Tragedi Amir Syarifuddin", Prisma 8 (Agustus, 1977), hal.99

Tawaran bantuan yang diajukan oleh Stikker dari Belanda ditolak yang secara resmi dibalas oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 25 September 1948 sebagai berikut :

"Apa yang dinamakan Belanda "bantuan moral" sudah cukup kita ketahui, antara lain berupa, pengusiran para pembesar, anggota delegasi, dan pegawai-pegawai Republik dari Jakarta. Bantuan itu juga berupa ancaman terus menerus disepanjang garis demarkasi dan blokade keras, yang akibatnya justru terasa sekarang sebagai rintangan bagi kecepatan bergerak dari tentara kita dalam usahanya untuk mengembalikan keamanan dan ketenteraman. Badan-badan propaganda Belanda kini melancarkan serangan-serangan hebat dan macam-macam hasutan terhadap Republik dan Kepala Negaranya. Radio Belanda sangat giat menyiarkan siaran-siaran dan kutipan-kutipan dari radio Muso dari Madiun.

Semuanya ini, memang benar-benar "bantuan moral" akan tetapi bukan buat Republik, melainkan untuk Muso dkk. di Madiun. "Bantuan" Belanda yang serupa itu sebenarnya sejak tahun 1946 telah diberikan dengan memberikan fasilitas kepada Setiadjit, Maruto Darusman, Mr. Abdul Madjid dan Suripno yang datang dari Eropa via Nederland ke Indonesia. Pada umumnya hasil-hasil yang telah dicapai oleh Muso dkk. sebegitu jauh adalah satu akibat dari satu kenyataan bahwa rakyat Indonesia akhirnya insyaf bahwa politik yang dilakukan oleh Belanda tidak cukup untuk menghargai cita-cita kemerdekaan kebangsaan Indonesia".<sup>20</sup>

Delegasi Indonesia di PBB, Sudarpo Sastrosatomo menerangkan kepada pers di New York sebagai berikut :

"Republik tidak akan menerima suatu turut campur tangan (intervensi) Belanda dalam kesukaran-kesukaran yang diderita sekarang akibat perbuatan kaum komunis di Madiun.

Jika kami membutuhkan bantuan dari luar, kami akan memintanya dari PBB. Jika pihak Belanda sekarang mencoba turut campur, hal itu hanya berarti seperti menggunakan palu dan arit sebagai alat untuk memasuki Republik kami yang demokratis".<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Nasution A.H., Loc.Cit.

<sup>21</sup> Ibid, hal.264-265



Bahkan PKI sendiri justru mendapatkan bantuan dari Belanda adalah kemungkinan besar, sebagaimana diterangkan oleh Menteri Kehakiman, Susanto Tirtoprodjo, dengan ditemukan bendera Belanda dan tanda-tanda pangkat Angkatan Laut Belanda, di pelbagai markas pemberontak PKI. Onghokham juga menulis bahwa di pusat Pesindo ditemukan dokumen-dokumen misalnya bendera Belanda dan lain-lain.<sup>22</sup>

Untuk mengimbangi propaganda PKI, Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Menteri Penerangan, Moh. Natsir, mengadakan penerangan-penerangan yang dibagi atas tiga tingkatan :

"Tingkat pertama, penerangan pendahuluan dengan maksud supaya rakyat percaya kepada TNI yang menyerbu. Selain memberikan penerangan, kepada rakyat dibagikan pula obat-obatan, ikan asin dan rokok. Rombongan penerangan serupa itu berangkat dari Kediri dan Solo masuk ke Madiun; dua orang pemuda diantara mereka hilang.

Tingkat kedua, penerangan netralisasi di daerah-daerah yang pernah diduduki kaum pemberontak; maksudnya untuk menjelaskan apa yang terjadi di Madiun.

Tingkat ketiga, penerangan melalui radio dengan tujuan agar rakyat dapat memahami tindakan pemerintah".<sup>23</sup>

Politik Pemerintah Republik Indonesia dalam menumpas pemberontakan PKI di Madiun yang demikian itu, mencapai hasilnya dengan keadaan PKI yang semakin terjepit karena berkurangnya dukungan rakyat. Dukungan rakyat kepada Pemerintah Republik Indonesia semakin kuat. Konperensi PSI di Yogyakarta mengambil keputusan bahwa dengan diproklamiirkan Pemerintah Sovyet Republik di Madiun, maka diperintahkan kepada segenap anggota Partai Sosialis Indonesia membela RI yang diproklamiirkan pada tanggal 17 Agustus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. DPP Kowani bersama seluruh anggotanya berdiri dibelakang Peme-

<sup>22</sup> Onghokham, Op.Cit. hal.67

<sup>23</sup> Nasution A.H., Op.Cit. hal.347

rintah Republik Indonesia yang diproklamirkan Sukarno-Hatta 17 Agustus 1945. Serikat Buruh Tionghoa menyatakan tetap setia kepada Pemerintah Sukarno-Hatta. PGRI menyatakan keluar dari SOBSI. Bahkan Front Nasional di Sumatera Timur yang berpusat di Medan mengeluarkan sebuah resolusi yang mendukung Pemerintah Republik Indonesia :

"Front Nasional di Sumatera Timur mendengar keterangan Pemerintah RI yang diucapkan oleh Perdana Menteri /Wakil Presiden Hatta didalam sidang BP-KNIP pada tanggal 20 September 1948 :

Mendengar pemandangan dan nasehat Dewan Politik Front Nasional di Sumatera Timur :

Memutuskan :

- a. Menyetujui dan menyokong cara perjuangan Pemerintah Negara RI untuk mencapai Indonesia Merdeka yang berdaulat dan demokratis;
- b. Tidak menyetujui sepak terjang golongan komunis yang tidak mementingkan persatuan kebangsaan dalam mencapai cita-cita yang tersebut diatas".<sup>24</sup>

PNI menyatakan sikapnya dengan maklumat yang berbunyi sebagai berikut :

- "1. Negara RI yang dikepalai oleh Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta adalah hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia.
2. Mempertahankan kemerdekaan Negara RI terhadap serangan dari luar maupun terhadap perkosaan dari dalam adalah kewajiban seluruh rakyat Indonesia.
3. Usaha PKI (Musu) dan FDR untuk merobohkan Pemerintah RI yang telah dimulai dengan perampasan kekuasaan Pemerintah daerah di Madiun, adalah nyata-nyata pemberontakan terhadap Negara RI dan pengkhianatan terhadap cita-cita kemerdekaan rakyat Indonesia.
4. Oleh karena itu maka Dewan Partai PNI mengajak seluruh rakyat dan memintakepada segenap anggotanya untuk membantu dengan sekuat tenaga usaha pemerintah menindas pemberontakan PKI (Musu) dan FDR dan membasmi pengacau-pengacau masyarakat dan pengkhianat Negara".<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Ibid, hal. 269

<sup>25</sup> Ibid, hal. 269-270

Badan Kongres Pemuda RI memecat Sumarsono sebagai Wakil Ketua Umum. Pemecatan itu didukung oleh IPPI, PIM, APPI, PPKI dan PPI, yang berarti dukungan kepada Pemerintah RI.

Bahkan Tamzil dan Muwalladi, pemuka-pemuka FDR menyiarkan surat terbuka antara lain berbunyi sebagai berikut :

"...Untuk mencegah segala kesan yang tidak betul dan menghilangkan segala paham yang salah, kami merasa perlu menerangkan, bahwa kami sebagai anggota Partai Sosialis lebih-lebih oleh karena kami tidak dibawa berunding lebih dahulu oleh Dewan Partai tidak merasa terikat oleh putusan Dewan Partai Sosialis untuk menggabungkan diri dalam PKI..."<sup>26</sup>

Perkumpulan "Korban Rasionalisasi" di Yogyakarta juga menyatakan tetap taat kepada Pemerintah RI yang sah.

Sembilan Serikat Sekerja yang bernaung dibawah SOBSI antara lain : Persatuan Buruh Indonesia, Serikat Buruh Kementerian Kehakiman, Serikat Buruh Kementerian Pekerjaan Umum, Serikat Buruh Bank Negara, Serikat Buruh Tembakau dan lain sebagainya, menyatakan keluar dari SOBSI dan berdiri dibelakang Pemerintah Republik Indonesia Sukarno-Hatta. Bahkan Komisariat Pesindo Sumatera dan cabang-cabang FDR di Sumatera juga menyatakan mendukung tindakan Pemerintah Republik Indonesia dalam menumpas pemberontakan PKI di Madiun, yang kemudian pernyataan itu diikuti oleh Pesindo Jakarta.

Dukungan kepada Pemerintah Republik Indonesia Sukarno-Hatta juga datang dari rakyat dan Pemerintah luar negeri misalnya dari negara-negara Arab. Pemerintah Yaman menyampaikan secara resmi pernyataan sikapnya terhadap Republik Indonesia sebagai berikut :

"Kami Raja Yaman dan seluruh rakyat Yaman sangat menaruh perhatian dan simpati besar terhadap RI. Tindakan-tindakan yang tegas dari republik terhadap segala anasir yang hendak merobohkannya itu, kami dapat berbangga de-

---

<sup>26</sup> Ibid, hal.271

ngan negara Republik yang muda itu; semoga Tuhan memberi perlindungan kepadanya.

Raja Yaman  
(Ahmed Hamiduddin)".<sup>27</sup>

Rakyat Indonesia mendukung pemerintahnya yang sah dibawah Sukarno-Hatta. Hanya dipusat pemberontakan di Madiun, PKI<sup>1</sup> mendapat dukungan sebagian rakyat. Hal itu diakui oleh seorang tokoh PKI, Suripno, sebagaimana dalam buku batatannya antara lain ditulis :

"Faktor yang paling besar yang menyebabkan kekalahan kami ialah bahwa sokongan dari rakyat jauh sangat kurang. Di daerah Madiun sokongan ada, malahan boleh dikatakan besar, akan tetapi diluar Madiun sokongan kecil sekali, dan beberapa kali rakyat didesa malahan disiapkan untuk menangkapi kami".<sup>28</sup>

Dinyatakan oleh Harjo Mariyun, bahwa setelah Siliwangi memasuki Madiun, ternyata jumlah PKI di Madiun tidak banyak. Yang banyak adalah orang-orang dari luar Madiun dan mereka telah melarikan diri ke daerah Ponorogo.<sup>29</sup>

Dengan demikian usaha-usaha PKI untuk menarik dukungan massa rakyat bagi keberhasilannya dalam pemberontakan itu mengalami kegagalan. Mereka dapat ditumpas dalam waktu relatif singkat, justru adanya kekompakan rakyat dan militer serta Pemerintah RI dalam penumpasan tersebut.

### C. Penumpasan secara militer

Pada rapat kabinet yang agaknya mengalami kesulitan Sabtu sore tanggal 18 September 1948 itu, A.H.Nasution sebagai wakil Panglima Besar APRI, melontarkan inisiatif yaitu mengajukan

<sup>27</sup>Ibid, hal.276-277

<sup>28</sup>Ibid, hal.384

<sup>29</sup>Wawancara dengan Harjo Mariyun, 10 Juli 1981, di Madiun

suatu konsep perintah bagi presiden, yang akan menjadi dasar tindakan militer. Pertimbangan A.H. Nasution itu didasarkan, atas berbagai laporan stafnya dan gerak gerik kaum komunis, maka dapat dipastikan mereka akan mengadakan aksi di Yogyakarta, maka semuanya akan ditentukan oleh kecepatan waktu, siapa yang akan mendahului.

Pada prinsipnya Presiden dapat menyetujui, akan tetapi secara resmi harus menunggu keputusan Kabinet yang baru dapat bersidang paling cepat dilaksanakan malam hari itu. Dengan kepastian akan keluarnya perintah tersebut, tenggang waktu yang ada digunakan oleh A.H. Nasution untuk mengadakan persiapan-persiapan yang kongkrit. Ia segera memerintahkan kepada Kapten Sudarsono yang sedang piket di Markas Besar untuk mengumpulkan para Komandan Brigade, KMK dan CPM di stafnya, dan segera meneliti pasukan-pasukan, markas-markas dan pusat-pusat dari pada Brigade ex Biro Perjuangan serta komunis SOBSI dkk. Tiap-tiap pasukan tersebut harus dibereskan sebelum matahari terbit. SOBSI yang bersidang di Tugu digrebek dan ditawan.

Pada pagi harinya A.H. Nasution melaporkan kepada Panglima Besar Sudirman telah selesainya pengamanan Yogya, yang telah menerima perintah dan wewenang untuk menyelamatkan negara dari Presiden dan yang telah disetujui oleh Sidang Kabinet. Pagi itu Panglima Besar Sudirman memberikan garis besar seluruh tindakan yang harus dipersiapkan, antara lain sebagai berikut:

"Pertama, untuk Jawa Timur Kolonel Sungkono akan diangkat menjadi Panglima Pertahanan. Yang bersangkutan akan diberi tahu sendiri oleh beliau melalui radio. Solo Semarang dipertanggung jawabkan kepada Kolonel Gatot Subroto dan dibawah perintahnya, Brigade "Siliwangi" dari Letnan Kolonel Sadikin dan Kusno Utomo haruslah segera dikerahkan untuk merebut kembali masing-masing Madiun dan Purwodadi".<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Nasution A.H., Op.Cit. hal.241

Pimpinan operasi militer diserahkan sepenuhnya kepada Kolonel A.H.Nasution oleh Panglima Besar, sebab beliau dalam keadaan sakit. Militer kemudian segera mengadakan penangkapan kepada Sekjen PKI Tan Ling Djie, anggota Politbiro PKI Abdul Madjid, Maruto Darusman dan Ngadiman. Juga ditangkap para pengurus dan orang-orang yang rapat dengan Lembaga Indonesia-Sovyet.

Markas Besar APRI merencanakan merebut kembali Madiun, harus berhasil dalam waktu dua minggu. Sesuai dengan garis besar yang diberikan oleh Panglima Besar Sudirman, maka operasi untuk merebut Madiun diadakan dari barat, Solo, ke timur. Dan sekaligus secara serentak diadakan dari timur ke Madiun. Demikian pula diadakan operasi pembersihan baik ke jurusan selatan maupun ke jurusan utara Madiun sebagai pusat pemberontakan PKI.

#### 1. Operasi dari barat

Untuk merebut kembali Madiun diserahkan kepada Letnan Kolonel Sadikin. Dengan kekuatan 5 Batalyon "Siliwangi", digerakkan menuju Madiun. Masing-masing Batalyon Sambas Atmadinata, Batalyon Daeng Adiwinata, Batalyon Umar Wirahadikusuma, Batalyon Ahmad Wiranatakusuma, Batalyon Sentot Iskandardinata. Disamping itu 3 batalyon tambahan yaitu : Batalyon Sumadi dari "Panembahan Senopati", Batalyon gabungan dibawah komando Kapten Lukas, yang terdiri dari kompi Lukas, Hizbullah dan Banteng, sisa Batalyon Sukowati didaerah Madiun, untuk memberikan bantuan.<sup>31</sup>

Batalyon Nasuhi di Solo selatan pada tanggal 26 September berhasil merebut kota distrik Sidharjo, suatu tempat yang penting sekali artinya mengingat letaknya antara dua pusat PKI, yaitu Ponorogo dan Wonogiri dan memisahkan komplek pegunungan antara Pacitan dan komplek Lawu. Gerakan ke jurusan Pacitan

---

<sup>31</sup>Ibid, hal.260

ini berjalan sangat lambat. Disamping kaum komunis mulai menggunakan siasat gerilya, daerah tersebut dikuasai oleh pasukan "Berani Mati" yang anggotanya terdiri dari bekas tahanan kriminal yang telah dibebaskan dari penjara Yogya dan Solo.

Pasukan Republik mengadakan pembersihan terhadap konsentrasi PKI disekitar daerah Wonogiri yaitu Tirtomoyo, Manyaran, Prajimaturo dan Wuryantoro.<sup>32</sup> Tirtomoyo berhasil direbut oleh TNI. Penjara Tirtomoyo merupakan bekas tempat penyimpanan dinamit. Didalamnya terdapat lebih dari 2.00 orang yang ditawan PKI. Kamar yang hanya 2 x 2 meter dihuni oleh 8 sampai 10 orang tawanan yang sudah dilucuti sama sekali. Juga ditemukan mayat 56 orang. Korban tersebut terdiri dari anggota polisi, pamong praja dan pemuda Islam.

"...Diantara yang dapat dikenal kembali terdapat jenazah Bupati, Patih, Wedana Asisten Sukoharjo, Asisten Tirtomoyo, Kyai Termas dan dua orang iparnya. Jenazah lainnya sukar untuk dikenal kembali".<sup>33</sup>

Moehkardi dalam bukunya Akademi Militer Yogya menyatakan bahwa penyerangan dan pengepungan Madiun dari barat, melalui tiga jurusan :

- a. Poros Brigade 13, dengan kekuatan batalyon Ahmad Wiranatakusumah dan Batalyon Sambas sebagai tenaga cadangan bergerak dengan route Surakarta-Karanganyer-Tawangmangu-Sarangan-Plaosan-Magetan-Maospati-Madiun. Di Tawangmangu pasukan Siliwangi mendapat bantuan dari kompi R, pasukan MA; satu peleton diantaranya terus mengikuti operasi Siliwangi sampai ke Madiun.
- b. Sebagai sayap kiri brigade, Batalyon Sentot ditugaskan merebut Ngawi dengan route, Surakarta-Sragen-Walikulun-Ngrambe-Magetan. Pada sayap kiri ini diperbantukan pula Batalyon Sumadi, Panembahan Se-

---

<sup>32</sup>Ibid, hal.308

<sup>33</sup>Ibid, hal.313

nopati , dan kompi gabungan Hizbullah dan Barisan Banteng.

- c. Sayap kanan diisi oleh Batalyon Nasuhi, Batalyon Husin Syah dan Brigade V Slamet Riyadi, Nasuhi ditugaskan merebut Pacitan dengan route Surakarta-Wonogiri-Baturetno-Pacitan. Sedang Husinsyah meneruskan ke Ponorogo. Pada Batalyon Nasuhi ini diperbantukan pasukan MA kompi S sedang 1 kompi pasukan MA yang lain, yaitu kompi U bergerak dari Yogya mengambil route Yogya-Wonosari-Pracimantoro-Pacitan".<sup>34</sup>

Sementara itu tindakan penumpasan pemberontakan yang telah dilakukan antara lain sebagaimana yang dijelaskan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tanggal 24 September 1948 sebagai berikut :

"...Tindakan untuk menindas pemberontakan itu hingga kini antaranya ialah penangkapan para pemimpin PKI dan FDR dan perkumpulan-perkumpulan yang ada dibawah pengaruh partai-partai itu,perlucutan senjata dari pasukan-pasukan dan gerombolan-gerombolan yang dipengaruhi kaum komunis. Sebagian besar tindakan-tindakan itu sudah dilakukan dan akan dilanjutkan beberapa hari lagi.Tindakan-tindakan ini telah dapat mengembalikan ketenteraman dan keamanan, karena ketenteraman dan keamanan penduduk telah diganggu oleh perbuatan-perbuatan pasukan-pasukan dan gerombolan-gerombolan yang dipengaruhi kaum komunis itu. Jika tindakan-tindakan ini sudah dilakukan semuanya, maka Pemerintah dan Markas Besar Tentara akan dapat mencurahkan perhatiannya pada cara memecahkan kesulitan-kesulitan di Surakarta dan menindas pemberontakan di Madiun".<sup>35</sup>

Dalam operasi itu, TNI selalu berhasil memukul mundur pihak pemberontak, sehingga daerah-daerah yang dikuasai pemberontak dengan mudah dapat direbut kembali.Keberhasilan-keberhasilan TNI sampai tanggal 23 September, sebagaimana diumumkan oleh Kolonel Gatot Subroto antara lain sebagai berikut :

"a. Sektor Sragen : pihak tentara pemerintah men-

---

<sup>34</sup>Moehkardi, Op.Cit. hal.96

<sup>35</sup>Nasution A.H.,Op.Cit. hal.262



- : duduki Walikukun.
- b. Sektor Tawangmangu : pihak tentara pemerintah menguasai kembali Sarangan.
- c. Sektor Wonogiri : pihak tentara Pemerintah berada 5 km didepan (Utara Sukorejo)".<sup>36</sup>

Setelah Batalyon Ahmad berhasil merebut Sarangan, maka datang pula Batalyon Sambas dan kompi Lukas untuk memperkuat Batalyon Ahmad Wiranatakusuma. Didaerah tersebut Siliwangi mendapat serangan dari pemberontak PKI, sebagaimana dikatakan oleh Gadis Rasyid antara lain sebagai berikut :

"...Sore hari setelah Sarangan diduduki, datang serangan Tentara merah dari Plaosan, Mereka menyerbu dengan menggerakkan massa rakyat 5.000--10.000 orang yang bersenjata bambu runcing, golok dan senjata tajam lainnya. Sebagian besar dari mereka adalah "warok" (jagoan), dan perampok dari Magetan yang dilepaskan oleh PKI dari penjara. Sambil mengeluarkan teriakan yang mengerikan "Ayo maju lur, ayo maju lur", dan mereka maju menyerang. PKI berhasil menggerakkan massa rakyat sebesar itu, antara lain karena dikatakan bahwa tentara Siliwangi itu adalah tentara Belanda sehingga rakyat bersemangat untuk menghadapinya. Tetapi serangan ini berhasil dibuyarkan, setelah Siliwangi menembakkan peluru martir".<sup>37</sup>

Pada tanggal 25 September, pasukan Siliwangi melanjutkan gerakannya ke Plaosan. Didaerah tersebut pasukan Siliwangi mendapat gangguan dari pihak lawan, sehingga terjadi kontak senjata yang berlangsung selama satu setengah jam. Akhirnya Siliwangi berhasil memukul mundur lawannya. Ternyata disekitar kejadian tersebut ada beberapa anggota tentara dan sipil yang dikurung dalam sel dibuat dari kawat. Pada waktu melarikan diri mereka menembaki tawanan tersebut, sehingga sebagian besar dari mereka me-

---

<sup>36</sup> Ibid, hal.307

<sup>37</sup> Moehkardi, Op.Cit. hal.131

ninggal.

Dari Plaosan tentara Siliwangi meneruskan perjalanannya melalui Gorang Gareng. Dalam catatannya Mayor Sambas Atmadinata menyatakan bahwa :

"...Perintah untuk memakai jalan yang paling singkat, ternyata tak dapat dijalankan, karena jalan singkat melalui Magetan dan Maospati tentu terjaga kuat dan diharapkan lawan.

Terpaksa dipakai jalan yang jauh lebih panjang, yaitu dari Plaosan memakai jalan desa dan seterusnya memakai jalan Gorang Gareng, dari sini memotong dengan jalan kaki (voetpad) yang menyambung jalan besar Madiun-Ponorogo, beberapa km sebelah selatan Pagotan...".<sup>38</sup>

Disekitar Gorang Gareng sewaktu pasukan Republik sedang beristirahat ada gangguan serangan dari dua jurusan. Dua kompi ditugaskan untuk mengadakan pembalasan dan berhasil memukul mundur pasukan PKI. Mereka meninggalkan Gorang Gareng dengan naik truk. Kemudian Siliwangi mengadakan gerakan pembersihan. Di perumahan pabrik gula Gorang Gareng ditemukan korban keganasan PKI sebanyak 50—60 orang,<sup>39</sup> yang mereka tembak sebelum meninggalkan tempat tersebut :

"Pada waktu pasukan Republik masuk Gorang Gareng, kira-kira 10 km disebelah barat Madiun pada tanggal 28 September 1948, gerombolan pengacau tidak dapat melarikan orang-orang yang mereka tawan. Maka sebelum mereka mundur terlebih dahulu mereka membunuh puluhan orang yang terdiri atas Kyai, guru sekolah, pimpinan rakyat dan pamong praja".<sup>40</sup>

Menurut Bupati Militer Achmad Sukarma Wijaya bahwa :

"...Kaum pemberontak di Gorang Gareng telah membunuh banyak tawanan dari Madiun dan sekitarnya, yang dikumpulkan ditempat itu.

Gerakan yang cepat dari pasukan Siliwangi itu dapat mencegah penyembelihan yang lebih besar...".<sup>41</sup>

<sup>38</sup> Nasution A.H., Op.Cit. hal. 322

<sup>39</sup> Moehkardi, Loc.Cit.

<sup>40</sup> Nasution A.H., Op.Cit. hal. 334

<sup>41</sup> Loc.Cit.

Dijelaskan oleh Kyai Haji Jamal yang ditawan PKI bersama 17 orang lainnya di Baeng, Takeran, bahwa ketika Siliwangi datang dari Gorang Gareng pukul 11.00 PKI di Takeran melarikan diri dan mereka tidak sempat membunuh tawannya. Begitu juga di daerah Kebonsari, Madiun, banyak markas-markas PKI yang ditinggalkan begitu saja setelah mendengar berita datangnya Siliwangi dari Gorang Gareng.<sup>42</sup>

Lebih jauh Kyai Haji Darussalam mengatakan bahwa disekitar Pabrik Gula Pagotan merupakan markas PKI, beliau pernah datang ke tempat tersebut untuk mencari kedua temannya yang diculik PKI yaitu Kyai Zuber dan Kyai AbdulMalik.<sup>43</sup> Sewaktu pasukan Siliwangi hampir sampai di Pagotan, mendapat gangguan yang menyebabkan perjalanan ke Madiun terhenti selama satu hari satu malam. Dalam hal tersebut Mayor Sambas Atmadinata sebagai Komandan Batalyon menulis antara lain sebagai berikut :

"...Kira-kira 5.00 m sebelum pabrik gula Pagotan, terdengar oleh voorpits beberapa letusan yang tak diketahui arahnya. Seluruh voorhoede mengambil dekking dan barisan terhenti. Sementara itu dicari keterangan tentang tembakan, tapi tak didapat. Sesudah satu jam terdengar lagi tembakan tadi, tidak pula jelas arahnya. Begitu berlangsung beberapa kali hingga hari mulai gelap. Sesudah malam juga terdengar beberapa kali tembakan, kadang-kadang dari atas genteng pabrik dan kadang-kadang dari dalam rumah-rumah pabrik. Untuk mengadakan gerakan malam, kita tidak berani karena tak mengenal situasi. Yang dapat dilakukan hanya memperkuat posten dan flandekking.

Baru pada esok harinya sebelum matahari terbit, kompleks pabrik dikurung dan diadakan doorzoekingen oleh satu kompi. Dalam waktu lebih kurang satu jam, pekerjaan ini selesai dan ternyata hanya ada ....1 orang dengan satu stegun.

Setelah diadakan pemeriksaan : benar-benar itu hanya seorang diri dengan kekuatan satu senjata.

---

<sup>42</sup>Wawancara dengan K.H.Jamal, 29 Juni 1981, di Magetan

<sup>43</sup>Wawancara dengan K.H.Darussalam, 29 Juni 1981, di Madiun

Kesimpulannya : batalyon dengan kekuatan 7.00 orang lebih dapat diikat oleh seorang lawan lebih dari 12 jam lamanya.

Dan akibat dari pada ini adalah oponent 1 hari yang sama sekali overbodig.

Satu hari ini oleh lawan digunakan dengan sebaik-baiknya untuk :

1. Memindahkan seluruh kekuatan dengan staf dan pemerintahnya ke komplek Gn.Wilis.
2. Mengadakan bumi hangus.
3. Mengangkut kekayaannya.
4. Menghilangkan dan mengangkut orang-orang yang dianggap musuhnya.
5. Dan sudah tentu membuat rencana-rencana baru".<sup>44</sup>

Pada tanggal 30 September pukul 16.15 Mayor Sambas Atmadinata dengan Batalyon 2/13 "Siliwangi" berhasil memasuki kota Madiun, dengan tidak mendapatkan perlawanan dari PKI karena mereka telah mengundurkan diri ke lereng Gunung Wilis.<sup>45</sup> Sebagaimana biasa setelah menduduki kota Siliwangi mengadakan pemberantasan dan segera menduduki penjara, Kantor Pos dan Radio. Dengan direbutnya Madiun oleh Siliwangi yang lebih cepat dari rencana semula bisa mencegah rencana PKI untuk membumi hanguskan penjara yang lebih kurang terdapat 1.000 orang didalamnya dan bangunan-bangunan lain.

## 2. Operasi dari timur

Pimpinan operasi penumpasan pemberontakan PKI dari timur adalah Kolonel Sungkono, sedang sebagai pelaksananya ditunjuk Mayor Yonosewoyo.

Menurut Djajoesman bahwa Brigade Surakhmat yang umumnya disebut "Brigade S" dengan kekuatan 3 Batalyon yang dipimpin o-

<sup>44</sup> Nasution A.H., Op.Cit. hal.324

<sup>45</sup> Ibid, hal.113 dan 114

leh Mayor Yonosewoyo bergerak dari timur.<sup>46</sup>

Serangan dari timur ini dilakukan melalui tiga jurusan :

- a. Batalyon Sabirin Mukhtar dan Mujayin bergerak melalui Trenggalek langsung menyerbu Ponorogo yang merupakan konsentrasi pasukan PKI yang kuat.
- b. Batalyon gabungan dibawah pimpinan Mayor Sabaruddin, bergerak melalui Sawahan, Dungus terus ke Madiun.
- c. Batalyon Sunaryadi dengan dibantu oleh Brigade Mobil Polisi Jawa Timur bergerak melalui kota Wilangan, nerobos Saradan terus ke Madiun".<sup>47</sup>

Batalyon Sunaryadi yang bergerak melauai utara, Wilangan, berturut-turut berhasil merebut kembali daerah Wilangan dan Saradan. Didaerah tersebut TNI mengadakan pembersihan dan penerangan kepada penduduk terutama pamong desa. Setelah 24jam Batalyon Sambas Atmadinata memasuki kota Madiun, pasukan Sunaryadi kemudian memasuki kota tersebut, setelah beberapa jam menunggu ditempat yang telah mereka capai lebih kurang 5 km dari Madiun.

Batalyon Sabaruddin yang bergerak melalui sektor tengah berhasil merebut Dungus, dimana induk pasukan pemberontak mengundurkan diri. Daerah tersebut menurut rencana mereka, akan dijadikan tempat gerilya. Kedatangan Batalyon Sabaruddin dari timur menyebabkan rencana mereka menjadi berantakan dan segera membelok ke selatan menuju Ponorogo.

"...Waktu pemberontak mendapat serangan dari arah timur, barat, dan utara mereka tergopoh-gopoh melarikan diri ke selatan, ke arah Ngebel dan Dagangan, dua kota kecil disebelah timur Ponorogo. Penduduk Dungus menceritakan, bahwa pagi-pagi pukul 10.00 Amir Syarifuddin, Muso, Sumarsono, Abdul Mutalib, Jokosuyono dan lain-lain masih berada di Dungus. Dan diduga mereka telah melarikan diri ke jurusan selatan. Barang-barang yang mereka tinggalkan menimbulkan kesan, bahwa mereka melarikan diri dengan tergopoh-gopoh, sebab tidak mengira akan mendapat

---

<sup>46</sup>Wawancara dengan Djajoesman, 12 Juni 1981, di Madiun

<sup>47</sup>Moehkardi, Op.Cit. hal.95

serangan dari arah atas gunung. Semua yang ditinggalkan itu berada dalam keadaan baik, yaitu sejumlah besar senjata, dua puluh buah mobil, sembilan cikal, amunisi, lima ratus ekor kambing, seratus ekor kuda, sejumlah pesawat radio, bahan pakaian, beras, mesin tulis dan mesin stensil, dan lain-lainnya. Selain itu ditemukan pula dokumen-dokumen. Diduga, bahwa mereka hanya membawa emas, perhiasan dan uang yang mereka rampas dari bank".  
48

Sebelum melarikan diri mereka membunuh tawanan-tawanannya yang dibawa dari Madiun. Dengan demikian TNI tidak berhasil mencegah pembunuhan secara besar-besaran oleh PKI dan tidak berhasil menangkap pimpinan-pimpinan mereka. Kegagalan tersebut oleh Mayor Yonosewoyo sebagai pimpinan operasi dari timur dinyatakan dalam catatannya antara lain sebagai berikut :

"Dengan kurir istimewa kita mencari kontak dengan sektor tengah. Ternyata karena mereka salah jalan, tidak dapat mencegah pembunuhan atas teman-teman kita yang dibawa oleh fihak FDR dan juga tidak dapat menangkap pemimpin mereka, hanya material berupa alat-alat kantor, radio, kendaraan dan lain-lainnya".<sup>49</sup>

Sementara itu Batalyon Sabirin Mukhtar dan Mujayin yang bergerak melalui Trenggalek berhasil mematahkan perlawanan Batalyon Maladi Yusuf di Ponorogo. Sehingga sisa Batalyon Maladi Yusuf dan induk pasukan PKI yang mengundurkan diri ke Ponorogo lalu bergerak ke Pacitan yang masih dikuasai oleh pasukan merah.

### 3. Operasi pembersihan

Setelah Madiun direbut oleh TNI pada tanggal 30 September 1948, maka untuk menyelesaikan penumpasan sama sekali pemberontakan itu direncanakan dua bulan lagi; yakni untuk merebut kota-kota kabupaten dibagian selatan daerah Madiun. Sehubungan dengan operasi pembersihan tersebut Presiden Sukarno dalam pi-

---

<sup>48</sup>Nasution A.H., Op.Cit. hal. 349

<sup>49</sup>Ibid, hal. 319

datonya menyatakan antara lain sebagai berikut :

"...Dengan jatuhnya kota Madiun, pekerjaan kita belum selesai. Ada daerah-daerah yang belum dibebaskan dari kaum pemberontak. Pemimpin-pemimpin PKI Muso masih berkeliaran, yang masih merupakan penyakit bagi republik yang mengganggu kesehatan negara. Bisul-bisul yang ada pada tubuh Republik inilah harus dilenyapkan sama sekali. Maka dari itu perintah saya kepada anggota AP dan alat-alat Pemerintah : Kerjakan terus, sehingga seluruh Republik aman dan tenteram kembali..."<sup>50</sup>

Kemudian TNI mengadakan aksi pembersihan ke jurusan Gunung Wilis dan Ponorogo. Di lereng Gunung Wilis TNI harus merebut desa demi desa karena daerah tersebut memang sudah dipersiapkan untuk perang gerilya bagi PKI. Pulung dan <sup>N</sup>gebel menjadi rebutan yang penting antara kedua pasukan, TNI dan pemberontak PKI. Namun akhirnya kedua daerah tersebut berada ditangan TNI dan menjadi basis patrolinya.

Setelah Ponorogo berhasil direbut oleh TNI selanjutnya diadakan pengejaran terhadap induk pasukan PKI yang membelok ke Pacitan. Kota tersebut harus segera direbut dari tangan pemberontak karena, dikhawatirkan para pemimpin pemberontak PKI melarikan diri ke luar negeri melalui Pacitan yaitu melalui jalan laut. Operasi dimulai pada awal Oktober oleh Batalyon Ahmad Wiranatakusuma. Pasukannya bergerak dengan route Selahung-Montongan-Tulakan terus ke Pacitan. Karena di Pacitan pasukan pemberontak terancam oleh Batalyon Ahmad Wiranatakusuma yang beroperasi dari timur dan ancaman Batalyon Nasuhi dari barat, maka induk pasukan pemberontak lalu bergerak lagi ke utara meninggalkan Pacitan. Pasukan mereka sebagian mendaki Gunung Lawu menuju Tawangmangu, termasuk dalam rombongan ini pucuk pimpinan pemerintahan komunis, diantaranya Mr. Amir Syarifuddin, Suripno, Joko-

---

<sup>50</sup> Ibid, hal.319

suyono dan lain-lain.<sup>51</sup> Sedang sebagian dari pasukan pemberontak, sebesar satu Batalyon beraksi dekat Nawangan, Gondang dan Banjar, dilereang selatan Gunung Lawu, antara Ponorogo dan Pacitan. Pasukan tersebut diikuti oleh pimpinan mereka, Muso.<sup>52</sup> Pada tanggal 15 Oktober 1948, Batalyon Ahmad Wiranatakusuma berhasil merebut kota Pacitan, tetapi yang ada disana hanya sisa-sisa pasukan pemberontak, kebanyakan mereka menyerahkan diri. Sebagaimana sudah menjadi kebiasaan PKI, sebelum meninggalkan Pacitan mereka membunuh tawanan-tawanannya, dan membakar pendopo kabupaten serta rumah gadai. Berkat petunjuk masyarakat, TNI menemukan beberapa puluh senjata yang disembunyikan oleh PKI dalam sebuah gua.

Pasukan pemberontak yang menuju Tawangmangu, di Purwan-toro bertemu dengan sisa-sisa pasukan Yadau yang terpukul mundur oleh operasi Batalyon Nasuhi di Wonogiri, sehingga pasukan mereka bertambah besar menjadi lebih kurang 2.000 orang dan bergerak mendaki Gunung Lawu yang akhirnya mencapai Tawangmangu. Dari sini mereka bergerak ke Cemorosewu-Sarangan-Plaosan. Karena disinyalir ada gerombolan pasukan pemberontak di Cemorosewu maka kompi Lukas dari Batalyon Umar Wirahadikusuma yang ditugaskan operasi teritorial di Sarangan, dikirim ke Cemorosewu. Operasi diadakan pada malam hari dengan penunjuk jalan SMC Firmans Harahap seorang kadet yang tahu betul medan didaerah tersebut. Dalam cuaca yang berkabut tiba-tiba mereka sudah mendekati perkemahan pasukan pemberontak yang sangat besar jumlahnya. Setelah terjadi tembakan menembak kompi Lukas terpukul mundur ke Plaosan. Sarangan kembali diduduki pasukan pemberontak.

Di Plaosan terjadi pertempuran yang berlangsung hampir

---

<sup>51</sup> Moehkardi, Op.Cit. hal.133

<sup>52</sup> Nasution A.H., Op.Cit. hal.353



semalam. Kompi Lukas yang mendapat bantuan dari Batalyon Sambas berhasil mengalahkan lawannya. Yang menurut Kolonel Suwardi T. bahwa : "...menjelang fajar pasukan Maladi Yusuf tersebut men-  
ngundurkan diri".<sup>53</sup>

"...Perlawanan Maladi Yusuf tersebut mungkin hanya sebagai tak tik untuk mengalihkan perhatian lawan saja, sementara itu induk pasukan yang lebih besar diam-diam bergerak ke utara menuju Ngawi...".<sup>54</sup>

Pada jalan Madiun-Solo pasukan pemberontak tersebut menyergap tiga mobil tentara dan dua mobil sipil, yang kemudian dibakarnya dan membunuh penumpangnya. Di tempat tersebut mereka juga membunuh Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Suryo (bekas Gubernur Jawa Timur) yang kebetulan pulang dari ibukota Yogyakarta.

TNI mengejar pasukan pemberontak tersebut selama satu minggu. Akhirnya mereka terpecah dalam beberapa gugus, antara lain gerombolan Yadau yang lari ke selatan berhasil dikepung oleh TNI. Sebagian menghilang kedalam kampung dan hutan, yang menurut Nasution dikatakan bahwa :

"...mereka tampaknya telah putus asa dan menyatakan hendak pulang ke kampung halamannya masing-masing karena tak dapat lagi terus mengikuti pimpinannya. Gejala seperti ini terutama terlihat pada mereka yang berasal dari Surakarta, Madiun dan Surabaya".<sup>55</sup>

Sebagian dari induk pasukan Amir-Jokusuyono dapat meloloskan diri ke utara, setelah mengadakan perlawanan. Tiga puluh lima orang tewas, sejumlah senjata ditinggalkan dan lebih kurang 2.00 orang ditawan.

Pada tanggal 12 Nopember 1948, pasukan tersebut berada di Getas, sebelah selatan Randublatung. Di daerah tersebut gugus depan pasu-

<sup>53</sup> Moehkardi, Op.Cit. hal. 139

<sup>54</sup> Loc.Cit.

<sup>55</sup> Nasution A.H., Op.Cit. hal. 366

kan pemberontak mendapat pukulan dari TNI. Induk pasukannya dapat menyeberangi bengawan Solo, menuju ke sebelah timur. Pasukan tersebut ditaksir sudah kurang dari separuh kekuatan semula, dan terbagi dalam beberapa gerombolan dalam usaha lari menyelamatkan diri. Mereka terus dikejar oleh pasukan Republik dari berbagai jurusan. Pada tanggal 17 Nopember pasukan pemberontak yang dipimpin Amir Syarifuddin-Jokosuyono berada disebelah barat Randublatung. Kemudian pasukan komunis tersebut bergerak ke arah Grobogan, 19 km sebelah utara Purwodadi.

Di daerah Ngaringan, sebelah timur Wirosari, Batalyon Kemal Idris dari Brigade 12 "Siliwangi" berhasil menangkap 12 orang PKI bersenjata lengkap. Ternyata mereka termasuk rombongan gerak cepat yang dipimpin Amir-Jokosuyono, terdiri atas 8.00 orang bersenjata lengkap dan 1.000 orang anggota keluarga. Karena dikejar oleh TNI mereka terpecah menjadi dua.<sup>56</sup>

Di sekitar Wirosari terjadi tembak menembak antara TNI dan pasukan pemberontak. Diduga mereka merupakan bagian dari gerombolan yang telah terpecah menjadi dua itu. Setelah bersarang di Grantil, 12 km timur laut Wirosari, mereka berhasil dikepung oleh TNI. Pasukan yang lain dikejar terus oleh TNI dan mereka berhasil ditawan.

Sementara itu pasukan Suyoto dari daerah Pati, yang akan menggabungkan diri dengan induk pasukan pemberontak dibawah pimpinan Amir dan Jokosuyono berhasil melewati Cepu, terus ke timur Madiun. Akhirnya terjadi konsentrasi pasukan PKI lebih kurang seribu orang di lereng Gunung Wilis, sekitar Danau Ngebel. Mereka ini melarikan diri dari sekitar Purwodadi, Cepu dan Pati.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup>Ibid, hal.367-368

<sup>57</sup>Ibid, hal.363

4. Muso tertembak mati dan tertangkapnya pemimpin-pemimpin pemberontak seperti Amir Syarifuddin, Jokosuyono dan lain sebagainya

Rombongan Muso yang beraksi di lereng Gunung Lawu, antara Ponorogo dan Pacitan dikejar oleh Batalyon Sudarsono dari "Siliwangi". Muso karena beberapa hal yang tidak diketahui meninggalkan rombongannya. Akhirnya pada tanggal 30 Oktober 1948 dia tertembak mati didaerah Ponorogo.

Kisah mengenai tertembaknya Muso tersebut sebagai berikut :

Di Semanding, 2 km sebelah selatan Sumoroto, yaitu jalan antara Balong-Sumoroto, seorang anggota polisi bernama Reksosudarmo dan seorang pegawai kaonderan bernama Suwarno dalam suatu perjalanan bertemu dengan seorang yang seperti orang desa. Orang tersebut bercelana hitam, kaos putih dan bersarung kurung, badannya besar dan gemuk.

Polisi curiga dan menanyainya. Ketika polisi sedang memeriksa surat keterangannya, tiba-tiba meletus sebuah peluru yang menyebabkan tewasnya polisi tersebut. Suwarno segera melarikan diri dan mencari bantuan.

Orang tersebut kemudian merebut sepeda dan setelah dikendarai beberapa jarak bertemu dengan sebuah delman. Kusir delman dipaksa supaya menyerahkan delmannya. Setelah kusir melapor kepada pager desa, mereka mengadakan pengejaran.

Komandan kompi Sumadi dan Kapten Sunandar yang sedang dalam perjalanan ke Krebbe dengan sebuah mobil melihat delman tersebut.

Dibelakang delman tampak dua orang pengendara sepeda, mereka ini memberi suatu isyarat kepada orang-orang yang berada dalam mobil, yang tidak dimengerti apa maksudnya.

Mobil tersebut dihentikan oleh kusir delman, dengan ancaman pistolnya memaksa penumpangnya menyerahkan mobilnya. Sebetulnya penumpang mobil tersebut bersenjata, tetapi tidak sempat menggunakannya. Mereka terpaksa menyerahkan dan meninggalkan mobilnya.

Ketika mobil akan dijalankan mendadak mesinnya mati, sehingga maksudnya untuk melarikan diri dengan mobil mengalami kegagalan. Mayor Sunandar mencari bantuan sedang Komandan Kompi Sumadi mengawasi kusir tersebut, yang kemudian melarikan diri ke dalam kampung. Bantuan satu seksi dibawah Letnan Mustajab, tiba. Segera diadakan penggerebekan dalam kampung dimana kusir tersebut melarikan diri, dan ia berhasil ditemukan oleh Komandan Kompi Sumadi sendiri.

"...Ketika ditanya oleh Komandan Kompi siapa namanya, dengan lantang sang kusir itu menjawab. "Saya Muso!" Komandan Kompi Sumadi meminta agar ia menyerah saja. Orang yang mengaku Muso tersebut menjawab, "Lebih baik mati dari pada menyerah!", lalu melepaskan tembakan dengan pistolnya.

Seluruh seksi mengerahkan segenap kekuatannya dan mengepung Muso sampai jarak 13 meter. Sekalipun demikian, Muso tetap tidak mau menyerah. Ia berkata lagi, kini dalam bahasa Jawa yang artinya : "Saya tetap Muso dan tetap berpendirian Muso!".

Pengepungan lebih diperketat lagi sampai jarak 7 meter. Terjadilah tembakan menembak antara Muso dan para pengepungnya. Tak ayal lagi, sebutir peluru bersarang didada kiri kusir itu, disusul beberapa peluru lainnya. Sang kusir rebah dan tidak bernafas lagi. Berakhirlah riwayat Muso".<sup>58</sup>

Dalam operasi pengejaran pada akhirnya TNI berhasil menangkap para pemimpin pemberontak PKI, Jokosuyono, Maruto Darusman, Sayogo dan empat orang lainnya di Periangan, 10 km sebelah barat Purwodadi. Mereka tertangkap ketika akan melintasi jalan raya Purwodadi-Godong menuju ke garis demarkasi. Jokosuyono hanya terpisah dari Amir Syarifuddin kira-kira 2.00 meter. Dengan tertangkapnya Jokosuyono, maka persembunyian Amir Syarifuddin dapat diketahui. Pada hari senen pukul 20.00 tanggal 29 Nopember 1948, Amir Syarifuddin dan Suripno dan kawan-kawannya berhasil ditangkap didaerah rawa dekat desa Klambu, barat laut Pur-

---

<sup>58</sup>Ibid, hal.355-357

wodadi. Prajurit-prajurit Republik dalam mendekati tempat pelarian pemimpin-pemimpin pemberontak tersebut dari arah garis status quo, yang letaknya disebelah barat. Para pemimpin pemberontak mencoba mencari jalan melalui rawa-rawa dan alang-alang, tetapi tertangkap dihutan dekat desa Klambu.

Pada waktu tertangkap, Amir Syarifuddin bersenjata pistol, berpakaian piyama dan sarung, tidak bersepatu. Misai dan janggutnya tidak dicukur, rambutnya panjang, kelihatan pucat dan kurus, karena sejak beberapa hari ia menderita dysentri. Sesudah tertangkap ia menyatakan bahwa tidak bermaksud melarikan diri ke daerah pendudukan Belanda, tetapi akan kembali ke Solo dan Yogya dengan menyamar sebagai pedagang. Suripno yang menyertai Amir Syarifuddin, pada waktu tertangkap tetap tampak tenang bahkan tersenyum. Kemudian mereka dibawa ke Kudus.<sup>59</sup>

Para pemimpin pemberontak PKI tersebut, pada tanggal 1 Desember 1948 dibawa ke Yogyakarta dengan naik kereta api untuk diadili. Pada tanggal 20 Desember mereka menerima hukuman mati.<sup>60</sup>

Demikian operasi militer dilaksanakan dengan dukungan sepenuhnya dari rakyat yang merupakan kekuatan pertahanan dan keamanan yang berintikan militer.

"...Bahwa seluruh rakyatlah yang melaksanakan pertahanan keamanan itu dan bukan hanya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), meskipun ABRI memang merupakan inti..."<sup>61</sup>

Sebagaimana saat direbutnya kembali Madiun oleh Pemerintah Republik Indonesia dari tangan pemberontak. Dalam hal ini Djamal Marsudi menulis sebagai berikut :

<sup>59</sup>Ibid, hal. 370

<sup>60</sup>Sejarah Kabupaten Madiun (Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun, 1980) hal. 319

<sup>61</sup>Sartono Kartodirdjo dkk., Op.Cit. hal. 338

"Dengan bantuan sepenuhnya dari rakjat Angkatan Perang (ABRI) kita dengan tjepat menudju kota Madiun. Pada tanggal 30 September 1948 Madiun berhasil diduduki dan dibebaskan dari tangan kaum pemberontak".<sup>62</sup>

Djajoesman pimpinan Cabang Angkatan '45 Madiun yang pada tahun 1948 memegang Danru "Ki Macan Kerah" mengatakan sebagai berikut:

"Bantuan rakyat sangat besar arinya bagi suksesnya operasi militer, sehingga pemimpin-pemimpin/tokoh-tokoh FDR-PKI yang berhasil melarikan diri dan bersembunyi di hutan-hutan dapat ditangkap sendiri oleh rakyat dan diserahkan langsung kepada pos-pos militer terdekat".<sup>63</sup>

Tatkala Pemberontak mengundurkan diri ke Gunung Wilis ternyata rakyat mendukung pasukan Republik Indonesia sehingga pemberontak tidak dapat melanjutkan gerilyanya.

Dalam Komunike Kementerian Pertahanan berbunyi sebagai berikut:

"Perebutan pemerintah di Madiun dilakukan oleh Polisi Militer, dan terjadi pertempuran antara pemberontak dengan pasukan Pemerintah dan rakyat selama satu setengah jam.

...Gerakan pembersihan terus dilakukan ke arah selatan dan ke utara Bojonegoro.

Pada pertempuran banyak rakyat yang menjadi korban, mereka bertempur dengan bambu runcing".<sup>64</sup>

Natsir sebagai Menteri Penerangan datang sendiri kedaerah-daerah yang telah direbut TNI, melihat adanya kesetiaan dan kecintaan rakyat desa terhadap pemerintahnya yang dibawah Presiden Sukarno dan Wakilnya Moh. Hatta.<sup>65</sup>

Dalam hal tersebut umat Islam mempunyai peranan tertentu dalam operasi penumpasan pemberontakan PKI. Oleh sebab itu, Onghokham

<sup>62</sup> Djamal Marsudi, Peristiwa Madiun (Jakarta : Merdeka-Press, 1967), hal.29

<sup>63</sup> Djajoesman, Loc.Cit.

<sup>64</sup> Nasution A.H., Op.Cit. hal.339-340

<sup>65</sup> Ibid, hal.348

menulis sebagai berikut : "Karena dukungan Islam Pemerintah mendapat dukungan sebagian masyarakat".<sup>66</sup>

Atas bantuan rakyat, pada akhir penumpasan pemberontakan tersebut Presiden Republik IndonesiaaSukarno, menyatakan terima kasihnya sebagai berikut :

"...Selanjutnya Presiden Sukarno menyatakan terima kasihnya kepada Angkatan Perang dan menyampaikan penghormatannya setinggi-tingginya kepada para pahlawan yang jatuh dalam menjalankan kewajibannya, serta menyatakan duka citanya kepada para keluarga korban pemberontakan. Pun beliau mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang tetap taat dan setia".<sup>67</sup>

Dikatakan oleh Moehkardi bahwa pada bulan Nopember 1948, kekuatan gerilya tentara merah yaitu pasukan pemberontak PKI, praktis telah dapat dipatahkan.<sup>68</sup>

Sebagaimana juga dinyatakan dalam Sejarah Nasional Indonesia bahwa sejak direbutnya dan dikuasai kembali Madiun oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Angkatan Perangnya pada tanggal 30 September 1948, maka dua bulan kemudian operasi penumpasan dinyatakan selesai.<sup>69</sup>

Akan tetapi karena agresinya militer Belanda terhadap Republik Indonesia dengan diduduki ibukota Republik Indonesia tanggal 19 Desember 1948, maka seluruh kekuatan RI dicurahkan untuk menghadapi agresinya militer Belanda dan mempertahankan RI. Dengan demikian, PKI beserta oknum-oknum pimpinannya belum tuntas diambil tindakan secara hukum. Sedangkan Pemerintah Republik Indonesia tidak menyatakan melarang Komunisme dan Marxisme, kare-

---

<sup>66</sup> Onghokham, Op.Cit. hal.68

<sup>67</sup> Nasution A.H., Op.Cit. hal.404

<sup>68</sup> Moehkardi, Op.Cit. hal.140

<sup>69</sup> Sartono Kartodirdjo dkk., Op.Cit. hal.59

na Pemerintah membela demokrasi dan menghormati segala ideologi.<sup>70</sup>

Hal ini sesuai dengan anjuran Mr.Kasman dalam Sidang Badan Pekerja KNIP pada tanggal 23 September 1948 yang menghendaki agar Pemerintah dalam tindakan-tindakannya tidak untuk menghancurkan aliran komunis, tetapi untuk menumpas pemberontak dan pengacau PKI.<sup>71</sup>

Sehingga mereka mampu kembali menyusun kekuatannya, yang kemudian pada tanggal 30 September 1965 memberontak lagi kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Akan tetapi dengan pertolongan Allah dan dengan kekuatan ABRI dan rakyat khususnya umat Islam, pemberontakan PKI tersebut berhasil dihancurkan. Akhirnya PKI dengan segala ajarannya dinyatakan terlarang di bumi Tanah Air Republik Indonesia.

---

<sup>70</sup>Nasution A.H., Op.Cit. hal.249

<sup>71</sup>Djamal Marsudi, Op.Cit. hal.30-31